

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Negara Korea Selatan merupakan suatu negara kecil bila disandingkan dengan tetangga dekatnya, Cina yang mempunyai penduduk terbesar di dunia, Rusia yang pernah (dan mungkin sebenarnya masih) merupakan salah satu negara adikuasa, dan Jepang yang merupakan suatu kekuatan ekonomi dunia.

Terbaginya Korea menjadi dua negara merupakan simbol warisan persaingan ideologi di masa Perang Dingin. Meskipun Perang Dingin sudah berakhir, yang ditandai runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an, wilayah ini masih menyisakan “saksi sejarah” perseteruan dua blok kekuatan dunia. Dengan begitu politik luar negeri yang kuat adalah hal yang penting untuk mengejar kepentingan nasional suatu negara dalam menghadapi situasi global yang berubah-ubah.

Korea Selatan pernah mengalami situasi dan keadaan politik yang paling sulit di tengah situasi politik internasional yang penuh persaingan. Wilayahnya yang berada di sekeliling negara-negara besar itu menjadikan Korea Selatan harus membuat suatu pilihan kebijakan diplomatik untuk mempertahankan negaranya dari ancaman negara-negara besar tersebut.

Dari kondisi tersebut menjadikan penulis tertarik untuk membahas fenomena ini dengan mengambil judul **“POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN**

## **PASCA PERANG DINGIN (Post Cold War Republic of Korea's Foreign Policy)".**

### **B. TUJUAN PENULISAN**

Beberapa tujuan penulisan dalam proses skripsi ini adalah:

*Pertama*, merumuskan sebuah pokok permasalahan dan mendeskriptifkan politik luar negeri Korea Selatan pasca Perang Dingin.

*Kedua*, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

*Ketiga*, memahami dan menambah literatur perspektif studi hubungan internasional dalam konteks masalah politik luar negeri serta penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah.

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Korea disebut juga sebagai negeri setengah pagi hari, sejarah Korea diwarnai dan ditandai dengan berbagai perang, serbuan dan didominasi asing sampai akhirnya menyebabkan terpisahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Semenanjung Korea dibatasi oleh tiga laut, Laut Kuning disebelah barat, Laut Jepang di sebelah timur, dan Laut China Timur di sebelah selatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Jawa Pos*, 11 Februari 2005, hal. 12.

Pembagian Semenanjung Korea merupakan salah sebuah bukti jelas yang diakibatkan oleh masa persaingan ideologi. Setelah Sekutu memenangkan Perang Dunia II, Semenanjung Korea dibagi dua oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada garis lintang 38°. Bagi Uni Soviet yang baru saja bergabung dengan Sekutu sebelum Perang Dunia II berakhir, pemberian belahan utara Semenanjung Korea sudah cukup memuaskan, sementara bagi Amerika Serikat, Semenanjung Korea adalah wilayah yang berada di luar garis pertahanannya. Atau dengan kata lain, Kepulauan Jepang lah yang akan dijadikan garis pertahanan dunia Barat dalam menghadapi masa Perang Dingin mendatang.

Oleh karena itu, sebagai pengganti Jepang, negara yang menyebabkan pecahnya Perang Pasifik dan Perang Dunia II, Sekutu tanpa keragu-raguan sedikitpun dapat membagi Semenanjung Korea. Dengan adanya pembagian itu, kedua Korea terpaksa dikuasai secara langsung oleh 2 negara adikuasa yang masing-masing kemudian berkembang menjadi negara pemimpin dalam masa Perang Dingin. Dalam situasi sedemikian itu, posisi Semenanjung Korea berkembang menjadi tempat persaingan ideologi antara komunisme-sosialisme dan kapitalisme-demokrasi. Lama kelamaan, Korea Utara didukung secara kuat oleh Uni Soviet dan RRC sementara Korea Selatan juga secara total dibantu Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu, politik luar negeri Korea Selatan tidak mempunyai pilihan sama sekali, hanya condong dan mengikuti dunia Barat saja.

Karena pihak Korea Utara selalu mencoba untuk mengkomunikasikan Korea Selatan dan dengan alasan itu juga Korea Utara pernah menyulut Perang Korea

(1950-1953), Korea Selatan terpaksa memperbolehkan penempatan pasukan PBB di dalam wilayah Korea Selatan. Pasukan PBB itu lama kelamaan diganti dengan pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, rencana pembangunan ekonomi Korea Selatan tetap dibantu oleh dunia Barat, khususnya oleh Jepang dan Amerika Serikat, sehingga politik luar negeri Korea Selatan, baik bidang politik maupun ekonomi sangatlah condong kepada dunia Barat. Berkat politik luar negeri Korea yang condong sepihak ke dunia Barat, Korea Selatan dapat berhasil mengembangkan perekonomiannya nasionalnya. Akan tetapi, Korea Selatan sama sekali mengabaikan urusan diplomatik dengan dunia Timur. Dunia Ketiga dan negara nonblokpun lebih memihak Korea Utara sehingga Korea Selatan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kegiatan diplomatiknya terhadap Dunia Ketiga dan negara-negara non-blok tersebut.

Selain dari politik luar negeri, permasalahan antar Korea di masa Perang Dingin pun hampir tidak menunjukkan kemajuan. Masalah reunifikasi Semenanjung Korea dan masalah-masalah antar Korea, khususnya proyek mempertemukan keluarga yang terpisah, tidak banyak berhasil bila dibandingkan dengan usaha keras yang telah dilakukan. Sebagai ganti keberhasilan perundingan itu, persaingan politik luar negeri antara Korea Utara-Korea Selatan justru menimbulkan persaingan peningkatan kekuatan militer dan persaingan diplomatik di seluruh dunia.

Sampai akhir tahun 1980-an, persaingan diplomatik bagi kedua Korea seringkali menimbulkan kritik tajam dari masyarakat internasional, khususnya kritikan terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan hak istimewa yang dimiliki

oleh para diplomatnya, Korea Utara berani melakukan penyelundupan obat bius dengan maksud untuk mencari valuta asing di negara-negara Eropa Utara dan Timur Tengah. Hal itu disebabkan oleh persaingan diplomatik antar Korea yang terlalu keras. Persaingan yang tidak membawa keberhasilan nyata sedikitpun itu baru dapat berakhir setelah Uni Soviet runtuh pada awal tahun 1990-an.<sup>2</sup>

Runtuhnya Uni Soviet yang menyusul keruntuhan blok Eropa Timur segera membawa dunia internasional ke dalam suasana berakhirnya persaingan dalam sistem Perang Dingin. Di antara negara-negara yang mengalami kekacauan akibat perubahan ideologi negara, Korea Selatan termasuk salah satu negara yang paling sibuk dalam menangani urusan politik luar negerinya. Dengan segera Korea Selatan dapat berhasil menjalin hubungan diplomatik penuh dengan dua negara adikuasa dari dunia sosialis internasional yaitu RRC dan Uni Soviet (saat itu).

Hampir seluruh negara Eropa Timur dan Vietnam (Republik Sosialis Vietnam) juga menormalisasikan hubungan kenegaraannya dengan Korea Selatan, baik sebelum maupun sesudah Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik dengan dua negara sosialis raksasa itu. Kemajuan yang terjadi dalam jangka waktu pendek itu, dari akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, benar-benar diluar dugaan karena kemajuan dan keberhasilan yang dicapai oleh politik luar negeri Korea Selatan jauh lebih banyak dan lebih memuaskan daripada yang pernah diusahakan dalam jangka waktu lebih dari 4 dasawarsa sebelumnya.

---

<sup>2</sup> Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'ood, *"Politik Luar Negeri Korea Selatan, Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional"*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, hal. 13-14.

Sebaliknya, politik luar negeri Korea Utara segera terpojok dan merosot karena kedua negara raksasa sahabatnya di belahan utara menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Yang jauh lebih buruk lagi bagi Korea Utara adalah bertambah buruknya perekonomian nasionalnya. Di masa Perang Dingin, Korea Utara dapat memperoleh bantuan dan mengimpor barang-barang kebutuhannya, khususnya minyak mentah dan biji-bijian dengan harga yang murah, yaitu harga yang disebut sebagai harga sahabat sosialis internasional, dari Cina, Rusia dan negara-negara Eropa Timur.

Akan tetapi, setelah berakhirnya sistem Perang Dingin, semua negara mulai mengutamakan urusan perekonomian daripada ideologi nasionalnya. Hal itu berarti bahwa, negara-negara sahabat Korea Utara itu tidak berdaya dan tidak bisa memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Berhentinya pemberian bantuan itu menyebabkan Korea Utara segera mengalami 4 kekurangan yang sangat serius, yaitu kekurangan valuta asing, bahan mentah untuk industri, tenaga listrik dan bahan makanan. Dalam keadaan seperti itu, Korea Utara terpaksa mengeluarkan kartu terakhirnya, yaitu menanggapi pendekatan yang dilakukan oleh Korea Selatan secara positif.<sup>3</sup>

Untuk menormalisasikan hubungan antar Korea dan permasalahan Semenanjung Korea, Korea Selatan mengajak Korea Utara untuk turun ke arena masyarakat internasional. Sebagai tahap pertama, Korea Selatan membiarkan Korea Utara dan negara adikuasa dari dunia barat seperti Jepang dan Amerika Serikat saling

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 15.

mendekati dan mulai mengusahakan prosedur yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan diplomatik. Sebagai hasilnya, sejumlah negara dunia Barat telah memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan Korea Utara, termasuk Australia, Italia, Prancis, Jerman dan sebagainya.

Dalam hal itu, dunia Barat menyerukan supaya Korea Utara membuka kembali pintu gerbang negaranya yang selama ini tertutup rapat, menyelesaikan masalah hak asasi manusia yang terjadi di Korea Utara dan juga menghentikan kemungkinan pengembangan bom nuklir dan menghentikan ekspor peluru kendali jarak jauh ke negara-negara Timur Tengah. Korea Selatan yang juga berusaha bersama dengan dunia Barat untuk mengajak Korea Utara bergabung dalam organisasi-organisasi, tidak hanya organisasi internasional seperti Organisasi Tenaga Nuklir Internasional (IAEA), tetapi juga organisasi-organisasi regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF).<sup>4</sup>

Sejak berdiri tahun 1948, Republik Korea telah menjalankan konsep demokrasi dan ekonomi pasar bebas, tetapi hubungan luar negerinya telah mengalami perubahan yang penting sejak negara tersebut berdiri. Ketika konfrontasi Timur-Barat yang terpusat diantara Amerika dan Uni Soviet berkembang kedalam situasi Perang Dingin menyusul Perang Dunia II, Republik Korea berusaha menjalin hubungan luar negerinya bersama dengan bangsa barat, yang menyokong demokrasi.

Bersamaan dengan semakin runcingnya konfrontasi Timur-Barat selama Perang Dingin, Republik Korea, yang dianggap sebagai anggota blok barat, mulai

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 16.

memperluas hubungan luar negerinya dengan meningkatkan pertalian dengan sekutu tradisional dan dengan membangun hubungan kerjasama dengan bangsa dari Dunia Ketiga. Sejak tahun 1970-an, diplomasi Republik Korea telah dibuat untuk mempromosikan reunifikasi Semenanjung yang independen dan damai. Republik Korea juga memperkuat pertaliannya dengan sekutu dan secara aktif berpartisipasi dalam Organisasi Internasional.<sup>5</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Republik Korea menjalankan diplomasi terutama dengan Amerika Serikat dan Jepang, mulai menjalankan kebijakan terbuka terhadap dunia luar sejak awal tahun 1970-an. Februari 1998, Kim Dae Jung terpilih sebagai presiden dan terus memperkokoh hubungan dengan Amerika dan Jepang. Sementara itu ia meningkatkan hubungan persahabatan dengan Tiongkok dan Rusia. Dalam politik terhadap Korea Utara, Kim Dae Jung menjalankan "kebijakan matahari" dengan mengajukan prinsip tiga pasal terhadap Korea Utara yakni saling tidak menggunakan kekuatan senjata, tidak melakukan penyatuan serap serta meningkatkan pertukaran dan kerjasama antara Korea Utara dan Selatan. Ia menganjurkan penyelesaian masalah Semenanjung Korea dengan "paket rencana" pengakhiran struktur perang dingin di Semenanjung Korea. Republik Korea masuk menjadi anggota PBB bersama Republik Rakyat Demokrasi Korea 17 September 1991. Roh Moo-hyun setelah menjadi presiden Februari 2003 menekankan pengembangan hubungan saling menguntungkan dan setara dengan Amerika Serikat, mendorong kerjasama regional Asia Timur Laut antara Korea Selatan, Tiongkok dan

---

<sup>5</sup> *"Fakta Tentang Korea"*, Korea Overseas Information Service, Seoul, 1973, hal. 53.

## E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk membantu penulis memahami dan menganalisa tentang Politik Luar Negeri Korea Selatan Pasca Perang Dingin, maka penulis menggunakan teori yang berkaitan dengan judul yaitu Teori Politik Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri, sebagai berikut ini:

### *Teori Politik Luar Negeri*

Orientasi politik luar negeri oleh Holsti diartikan sebagai sikap atau komitmen suatu negara terhadap strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan domestik dan luar negerinya, serta menanggulangi beberapa ancaman yang berkesinambungan.<sup>8</sup>

Politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang berupa tujuan suatu negara.<sup>9</sup> Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional (*National Interest*).

Pada dasarnya politik luar negeri suatu bangsa, sekalipun mengatasnamakan negara, pada hakikatnya bukanlah dibuat oleh negara, melainkan aktor atau kelompok

---

<sup>8</sup> William D. Coplin, "*Pengantar Politik Internasional*", (Suatu Telaah Teoretis) alih bahasa: Drs. Marsedes Marbun, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 108.

<sup>9</sup> J. Frankel, "*International Relations*", terjemahan Laila Hasyini, Ans. Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980.

yang bertindak atas nama negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijaksanaan politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

*“Foreign policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”*<sup>10</sup>

Dalam urusan tersebut, politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik lain atau unit internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Dari definisi diatas, jelaslah bahwa kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang politik luar negeri berada ditangan pemerintah pusat. Dalam hal ini aktor pengambilan keputusan terletak ditangan Perdana Menteri dan Presiden.

### ***Konsep Kepentingan Nasional***

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam Politik Internasional.<sup>11</sup>

Menurut Hans. J Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang

---

<sup>10</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *“The International Relations Dictionary”*, Halt Rinchart and Winstone Inc, USA, 1969, terjemahan Wawan Juanda Abardin, p. 7.

<sup>11</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *“Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power”*, Edisi Ketiga, Penerj. Mercedes Morbun, CV. Abardin, Bandung, 1990, hal. 114.

bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekerasan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama.<sup>12</sup>

Sedangkan Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>13</sup> Hal ini mengartikan bahwa, kasus politik luar negeri dapat saja merupakan masalah kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi, keamanan ataupun politik suatu negara-bangsa. Masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila penyelesaiannya memerlukan dimensi luar-negeri, apabila kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

Sebaliknya, apabila masalah-masalah tersebut dapat / diselesaikan oleh kekuatan nasional, dengan tidak memerlukan aspek luar negeri, maka apapun yang menjadi pemicunya tidak dapat dianggap sebagai politik luar negeri. Masalah kelangsungan hidup negara bangsa misalnya, tidak selalu berarti bahwa yang mengemuka berasal dari luar atau harus selalu melalui bantuan luar negeri (asing).

---

<sup>12</sup> Mohtar Mas' oed, *"Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi"*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 140.

<sup>13</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *"The International Relation Dictionary"*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982, p. 7.

Kasus pemberontakan, separatisme ataupun subversi lainnya, dapat saja ditumpas oleh kekuatan militer nasional negara bangsa yang bersangkutan.

Sebaliknya, walaupun secara awam kasus-kasus kebudayaan dianggap lebih sederhana, lebih tidak mendesak, akan tetapi apabila pada kenyataannya upaya pemenuhan masalah kebudayaan tersebut menyangkut aspek politik luar negeri, maka kasus-kasus serupa itu adalah kasus politik luar negeri.<sup>14</sup>

Dalam pembahasan mengenai politik luar negeri Korea Selatan ini, unsur-unsur yang vital bagi negara Korea Selatan adalah mencakup kesejahteraan ekonomi dan keamanan militer. Maka akan ada upaya dari Korea Selatan yang perlu diperjuangkan dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Adapun dalam membahas permasalahan yang timbul dalam tulisan ini, Korea Selatan memiliki kepentingan dari berbagai segi:

### **1. Kepentingan Ekonomi**

Setiap pemerintahan di dunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan yang meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan hal utama dalam politik luar negerinya.<sup>15</sup> Korea Selatan melakukan kebijakan liberalisasi ekspor-impor secara besar-besaran setelah memasuki tahun 1980-an, seiring dengan kecenderungan masyarakat internasional dan perubahan lingkungan

---

<sup>14</sup> Tulus Warsito, *“Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya”*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1998, hal. 30-31.

<sup>15</sup> H. J. Morghentau, *“Politik Antar Bangsa”*, Yayasan Obor Indonesia, 1990.

perdagangan.<sup>16</sup> Korea Selatan juga melakukan kebijakan ekonomi di masa awal tahun 1990-an dimulai dengan perluasan pasar internasional ke kawasan Eropa Timur, Uni Soviet dan Cina. Sejalan dengan keberhasilan kebijakan ekonomi, setiap tahun, Korea Selatan dan negara-negara rekannya di kawasan tersebut terus meningkatkan volume perdagangan dan memperluas bidang kerjasama.<sup>17</sup>

## 2. Militer Security

Militer security merupakan suatu institusi yang sah dan memiliki kekuatan untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kemiliteran. Militer security ini terkait dengan keamanan nasional suatu negara. Untuk menjaga keamanan militernya dengan memenuhi kebutuhan militernya agar kedaulatan suatu negara terjaga dari berbagai ancaman.<sup>18</sup> Dimana pada tahun 1980-an, ancaman terbesar datang dari pembangunan fasilitas militer Uni Soviet dan pengembangan kemampuan militer Uni Soviet di Siberia Timur. Pengembangan fasilitas dan kemampuan militer Uni Soviet itu akan meningkatkan peran Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik yang akan dapat mengancam stabilitas yang sudah ada di wilayah tersebut. Pada gilirannya, peran Uni Soviet yang bertambah besar itu akan memberikan rasa percaya diri pada Korea Utara karena Korea Utara merasa yakin bahwa Uni Soviet akan memberikan bantuan militer bila Korea Utara membutuhkannya.

---

<sup>16</sup> Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'oed, *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>18</sup> H. J. Morghentau, *Op.Cit.*

Menghadapi ancaman itu, Korea Selatan juga mengembangkan kekuatan militernya dengan menambah jumlah personel militer. Meskipun Korea Selatan mendapat dukungan dari pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan, Pemerintah Korea Selatan dibawah kepemimpinan mantan Presiden Park Chung-Hee (1961-1979) masih khawatir terhadap serangan militer Korea Utara dan oleh sebab itu sangat menaruh perhatian pada perkembangan militer Korea Utara. Meskipun telah melaksanakan sistem pertahanan nasional, sampai tahun 1980-an, pihak Korea Selatan tidak mampu untuk mempertahankan diri dari serangan pihak Korea Utara karena kekuatan militer Korea Utara jauh lebih unggul dari kekuatan militer Korea Selatan. Anggota militer tetap mencapai jumlah 1,2 juta personel yang berarti dua kali lipat dari anggota militer Korea Selatan yang hanya berjumlah 600 ribu personel. Sehingga sampai akhir tahun 1980-an, pasukan AS di Korea berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan militer antar Korea.<sup>19</sup> Pemerintah Korea Selatan menekankan industri pertahanan Korea Selatan. Industri pertahanan Korea Selatan telah mendapat pengakuan secara luas dari masyarakat dunia. Dengan giat Korsel melakukan pembangunan mandiri industri militer.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas' oed, *Op. Cit*, hal. 20-21.

<sup>20</sup> [http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news\\_issue\\_detail.htm?No=11129](http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=11129), diakses 2 Oktober 2007.

**Tabel 1. 1**  
**Military Forces in the Region, 2001/02**

	South Korea	North Korea	Japan	China	Russia
<b>Army</b>					
Personnel	560,000	950,000	148,700	1,600,000	321,000
Main battle tanks	2,330	3,500	1,050	8,000	21,820
<b>Navy</b>					
Personnel	60,000	46,000	44,200	250,000	171,500
Frigates	9	3	12	41	10
Submarines	19	26	16	69	56
<b>Air Force</b>					
Personnel	63,000	86,000	45,400	420,000	184,600
Combat aircraft	555	621	297	2,900	27,636

Sumber : International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002.<sup>21</sup>

### ***Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri***

Menurut William D. Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau Foreign Policy, yaitu:

*“Dan salah besar jika menganggap para pembuat kebijakan luar negeri bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat 3 konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri”<sup>22</sup>*

3 konsiderasi tersebut adalah:

1. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.

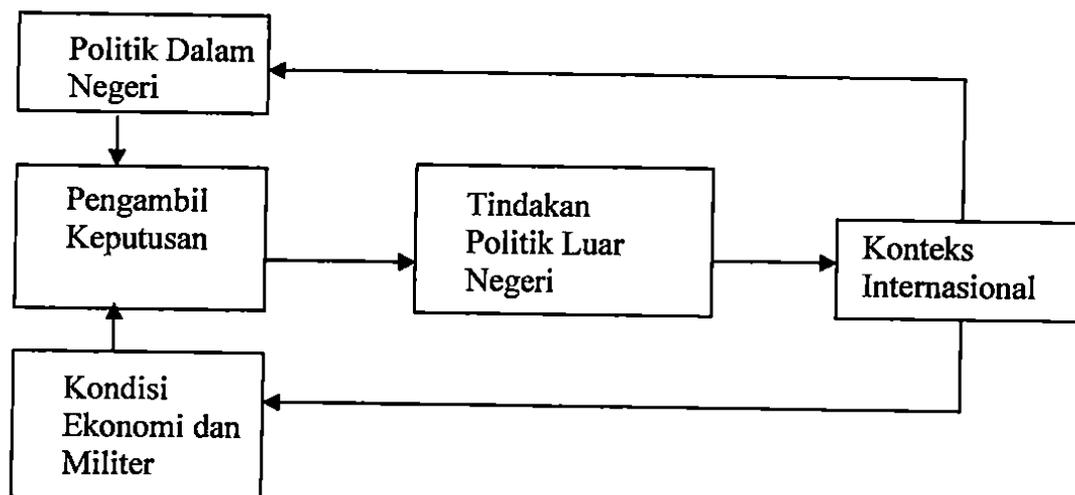
<sup>21</sup> [http://en.korea.com/view\\_page.asp?url=http://www.korea.net/korea/korea.asp](http://en.korea.com/view_page.asp?url=http://www.korea.net/korea/korea.asp), diakses 13 Juni 2007.

<sup>22</sup> William D. Coplin, “Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis”, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 30.

2. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
3. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh negara-negara lain yang relevan dalam permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan dalam Gambar 1.1:

Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Sumber : William D. Coplin, *Introduction to International Politics : A Theoretical Overview* (terjemahan Mercedes Marbun), CV Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.

Dari bagan tersebut nampak kaitan-kaitan antara kondisi politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, pembuatan kebijakan, dan konteks internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan atau tindakan politik luar negeri suatu negara.

Penempatan kerangka konseptual tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, Kondisi Politik dalam negeri suatu negara merupakan salah satu variabel penentu dalam pembuatan keputusan luar negeri negara tersebut. Situasi politik domestik merupakan keadaan politik dalam negeri suatu negara yang, meliputi: budaya dan tingkah laku politik, sistem pemerintahan, struktur masyarakat. Bangsa Korea sudah sejak lama paling mengutamakan urusan kenegaraan, suatu urusan yang bagi banyak orang dianggap jauh lebih penting daripada urusan pribadi. Pengaruh politik dalam masyarakat Korea sangat besar dan perbaikan dan perubahan UUD terlalu sering terjadi. Isu terpenting dalam setiap perbaikan UUD itu adalah mengenai masa jabatan kepala negara. Pada beberapa periode kepemimpinan di Korea, masalah keamanan nasional menjadi prioritas utama. Di Korea, Badan Eksekutif mempunyai wewenang yang jauh lebih besar dari pada kedua Badan yang lain (Legislatif dan Yudikatif).<sup>23</sup>

### 2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Termasuk faktor geografis mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan dilihat dari salah satu prinsip yang mendasari pemilihan tujuan kebijaksanaan luar negeri, yaitu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran Negara, dan letak geografis suatu Negara menjadi salah satu modal dalam hubungan dengan pusat

---

<sup>23</sup> Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'ood, *"Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar"*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hal. 9.

industri dunia, pertimbangan sumber daya alam, iklim, topografi,<sup>24</sup> misalnya Korea Selatan, wilayahnya yang berada di sekeliling negara-negara besar menjadikan Korea Selatan harus membuat suatu pilihan kebijakan diplomatik untuk mempertahankan negaranya dari ancaman negara-negara besar tersebut

Kapabilitas ekonomi dan militer juga berperan sebagai penyangga untuk mengimplementasikan tujuan eksternal suatu Negara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi yang dimiliki suatu Negara, maka para pembuat keputusan dapat melihat apakah kebijakan yang dilakukan tepat dengan kondisi ekonomi dalam negerinya. Begitu pula dengan kemampuan militer yang merupakan instrument penting dari aspek keamanan. Dengan mempertimbangkan kondisi militer dalam negeri maka dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah dalam mengambil kebijakan.

Dilihat dari kemampuan ekonomi Korea Selatan, Korea Selatan memiliki sumber daya ekonomi yang baik dimana pada pasca Perang Dingin akhir tahun 1980-an, perekonomian nasional Korea mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya kurs bunga pinjaman valuta asing, harga impor minyak mentah yang murah, dan nilai tukar dolar AS yang mengalami kemerosotan. Berkat kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat ekonomi internasional, dimana kecenderungan itu sangat menguntungkan Korea Selatan, pada tahun 1988 Korea

---

<sup>24</sup> Rodee, "*Pengantar Ilmu Politik*", alih bahas: Zulkifly Hamid, (Jakarta PT. Persada, 2000), hal. 502.

berhasil menduduki urutan nomor 10 diantara negara-negara di dunia dalam bidang ekspor barang.<sup>25</sup> Dengan volume ekspornya yang mencapai 59,3 milyar dolar AS.<sup>26</sup>

Dilihat dari kemampuan militer Korea Selatan bila dibandingkan dengan saudara kembarnya kekuatan militer Korea Utara jauh lebih unggul dari kekuatan militer Korea Selatan. Anggota militer tetap mencapai jumlah 1,2 juta personel yang berarti dua kali lipat dari anggota militer Korea Selatan yang hanya berjumlah 600 ribu personel.<sup>27</sup>

### 3. Konteks Internasional

Konteks Internasional yaitu situasi di suatu negara di mana politik luar negeri ditujukan serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan Semenanjung Korea berlangsung dalam hubungan antar negara raksasa yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh besar bagi keuntungan dan keamanan masing-masing negara raksasa di sekitar Semenanjung Korea. Pertentangan antara negara-negara raksasa yang termanifestasi dalam Perang Dingin tersebut berpengaruh terhadap situasi di Semenanjung Korea. Situasi tersebut juga berpengaruh pada hubungan dua Korea. Korea Selatan adalah negara yang latar belakang masalah sejarah didasarkan pada pemisahan bangsa Korea oleh Sekutu dan Perang Korea (1950-1953) yang pernah menghancurkan semua fasilitas industri dan mengorbankan jutaan jiwa. Ketakutan terhadap adanya serangan dari luar, khususnya dari Korea Utara, menyebabkan pemerintah masih menekankan

---

<sup>25</sup> Lihat lampiran 1 daftar urutan negara-negara di dunia dalam jumlah nilai ekspor pada halaman 114.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>27</sup> Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'ood, *Op. Cit*, hal. 21.

pentingnya masalah keamanan nasional dan sering menggunakan isu tersebut dalam kampanye pemilu dan sebagainya.

## **F. HIPOTESA**

Dari Permasalahan yang ada, dan didukung oleh kerangka dasar pemikiran yang relevan, maka dapat ditarik sebuah Hipotesa sebagai jawaban sementara. Korea Selatan dalam politik luar negerinya pasca Perang Dingin melakukan upaya kebijakan hubungan luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya (ekonomi dan militer). kebijakan-kebijakan tersebut yakni: Korea Selatan melakukan kebijakan liberalisasi ekspor-impor secara besar-besaran, Melindungi keamanan Nasionalnya melalui Militer Security (*self-reliant defense*) yang dipengaruhi oleh kondisi domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Supaya dalam pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis akan memberi jangkauan penelitian yang diutamakan pada politik luar negeri Korea Selatan pasca Perang Dingin, dengan membatasi penelitian pada pasca Perang Dingin sampai dengan masa sekarang (1980-2007). Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk tidak mengabaikan kejadian-kejadian waktu lain yang relevan, dengan maksud sebagai tinjauan historis dan untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

## **H. METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data penelitian dalam penulisan proposal ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu bersumber dari buku, artikel, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan literatur-literatur lain yang relevan dengan tema penulisan.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

- BAB I.** Pendahuluan. Berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran (Teori Politik Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri), hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II.** Sejarah Korea Dan Latar Belakang Perang Dingin. Berisi paparan mengenai kondisi geografis Korea, sejarah Korea (sejarah awal bangsa Korea, kemerdekaan dan pertumbuhan Republik Korea, berdirinya Republik Korea dan Republik Demokrasi Rakyat Korea), serta menggambarkan mengenai latar belakang Perang Dingin dan Perang Dingin itu sendiri.
- BAB III.** Politik Luar Negeri Korea Selatan. Berisi tentang kekuatan nasional Korea Selatan (sumber daya, kemampuan industri, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, dan kesiapsiagaan militer), serta

berisi tentang deskripsi umum mengenai politik luar negeri Korea Selatan pada masa Perang Dingin (hubungan luar negeri Korea Selatan dengan dunia Barat, dan hubungan luar negeri Korea Selatan dengan dunia Timur).

**BAB IV.** Upaya Yang Dilakukan Korea Selatan Dalam Politik Luar Negerinya Pasca Perang Dingin. Berisi tentang kepentingan ekonomi (kerjasama bidang ekonomi dan liberalisasi ekspor-impor secara besar-besaran), serta berisi tentang militer security (kerjasama bidang pertahanan dan melindungi keamanan nasionalnya melalui militer security (reformasi pertahanan dan pengembangan sistem persenjataan secara mandiri)).

**BAB V.** Kesimpulan. Berisi mengenai apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

**LAMPIRAN.** Berisi tentang lampiran-lampiran yang penulis dapatkan sebagai pendukung penulisan skripsi.